

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. SUHALI FADIL THOHIR**
2. Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**
3. NHK : **39772**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.454.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/150 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah Seluas 11500 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 2540 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 855 m²/100 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
5. Tanah Seluas 269 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 269.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **445.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX 150C (KLX150S) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **489.300.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **257.715.607****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **2.646.015.607**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.646.015.607

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.